

**ANALISIS PENGARUH PERENCANAAN DAN PENYERAPAN
ANGGARAN TERHADAP KEMISKINAN
(Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku)**

Jancen Roland Patty

Politeknik Negeri Ambon

yansenpatty@gmail.com

Abstract

The purpose of the study was to analyze the influence of budget planning and absorption on poverty in regencies/cities in Maluku Province. The type of research is a causal relationship or relationship between variables and this study is a census study, namely a study that uses all members of the population as samples. The data used are secondary data in the form of periodic data (cross section), namely poverty data, planning, and budget absorption in 11 regencies/cities in Maluku Province. Data testing through multiple linear regression analysis with a significance level of 0.005. The results of the study prove that the budget planning variable has a significant influence on the poverty variable. This is evidenced by the results of the t-statistic test which shows a probability value or significant value of 0.025 below the significance level of 0.05. Furthermore, the budget absorption variable has a significant influence on the Poverty variable. This is evidenced by the results of the t-statistic test which shows a probability value or significant value of 0.034 below the significance level of 0.05

Keywords: Budget Planning, Budget Absorption, Poverty

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh perencanaan dan penyerapan anggaran terhadap kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Tipe penelitian adalah hubungan kausal atau hubungan antar variabel dan penelitian ini merupakan penelitian sensus, yaitu penelitian yang menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk data berkala (*cross section*) yaitu data kemiskinan, perencanaan, dan penyerapan anggaran di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Pengujian data melalui *analisis regresi linier berganda* dengan derajat signifikansi adalah 0,005. Hasil penelitian membuktikan variabel perencanaan anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t-statistik yang menunjukkan nilai probabilitas atau nilai signifikan sebesar 0,025 di bawah tingkat signifikan 0,05. Selanjutnya, variabel penyerapan anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t-statistik yang menunjukkan nilai probabilitas atau nilai signifikan sebesar 0,034 di bawah tingkat signifikan 0,05

Kata Kunci : Perencanaan Anggaran, Penyerapan Anggaran, Kemiskinan

1. PENDAHULUAN

Peran APBD sebagai pembangunan daerah yaitu untuk pedoman dalam perencanaan besaran penerimaan dan pengeluaran berbagai sektor yang difokuskan pada upaya pelaksanaan program dan kegiatan, seperti kesempatan atau akses yang lebih besar terhadap aset produksi, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, prasarana, dan fasilitas lainnya yang menunjang aktivitas daerah. Semua program tersebut memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat yang berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dalam mewujudkan peningkatan pertumbuhan dan pengembangan daerah melalui kebijakan keuangan daerah dapat dilakukan dengan memperhatikan

kondisi masyarakat yang ada, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang tersedia akan berdampak pada perekonomian daerah.

Adanya kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, serta atas tanggung jawab dengan mendengarkan aspirasi masyarakat. Hal tersebut memiliki kemungkinan besar daerah dapat merumuskan pelaksanaan dan perancangan pembangunan sesuai kebutuhan daerah. Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang baik dan tepat sasaran dapat berdampak baik bagi daerah dan menyejahterakan masyarakat.

Sehingga antara pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat saling berhubungan.

Perkembangan penyerapan pendapatan dan belanja di Pemerintah Provinsi Maluku di tahun 2017 sampai tahun 2022 seperti pada tabel berikut ini:t:

Tabel. 1 Persentasi Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2014 – 2022 (dalam rupiah)

Tahun	Rasio Pendapatan	Rasio Belanja
2014	97%	88,29%
2015	86,01%	74,41%
2016	89,91%	99,51%
2017	90,63%	93,33%
2018	92,71%	91,96%
2019	95,36%	93,71%
2020	70,45 %	94,79%
2021	90,02 %	93,02%
2022	95,34%	96,33%

Sumber: BPS Provinsi Maluku

Dari data di atas, terlihat realisasi pendapatan daerah Provinsi Maluku di tahun 2014 sampai tahun 2022 mengalami fluktuasi. Rasio target terhadap realisasi yang tertinggi di tahun 2019 yaitu sebesar 95,36% dan yang terendah di tahun 2020 sebesar 70,45%. Di tahun 2021 mengalami peningkatan realisasi dari target dikarenakan kondisi perekonomian di tahun tersebut dalam kondisi baik. Sedangkan penurunan realisasi di tahun 2020 disebabkan karena pandemic Covid-19 yang menyebabkan berbagai program yang tidak dapat dilaksanakan. Disamping itu, rasio target terhadap realisasi belanja yang tertinggi di tahun 2022 yaitu sebesar 96,33% dan yang terendah yaitu di tahun 2015 yaitu sebesar 74,41%. Peningkatan realisasi belanja diakibatkan karena beberapa program yang meningkat di tahun 2019 yang menyebabkan ditingkatkan alokasi belanja di tahun bersangkutan. Sedangkan penurunan realisasi belanja di tahun 2015 disebabkan karena beberapa program yang tidak berjalan atau direalisasikan di tahun 2015.

Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin (Simatupang dan Saktyanu K, 2003). Dengan penurunan jumlah penduduk miskin akan dan mengurangi angka ketimpangan distribusi pendapatan (Index Gini Ratio). Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa.

Cara penanggulangan kemiskinan harus membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan serta diperlukan strategi penanganan yang tepat dan berkelanjutan. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan, dan dari variabel ini dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan. Strategi dan kebijakan tersebut pada Kabupaten/Kota akan di akomodir dalam perencanaan anggaran yang dilakukan. Perencanaan anggaran pada Kabupaten/Kota dimulai dari proses penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi serta arah pembangunan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Setelah RPJP Daerah ditetapkan, selanjutnya Pemerintah Daerah menetapkan RPJM Daerah dengan memuat hal-hal tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum daerah, program serta kegiatan Dinas yang dituangkan dalam renstra dengan acuan kerangka pagu indikatif. Perencanaan anggaran dinas pada masing-masing Kabupaten/Kota dimulai dari unit/bagian, dan mengusulkan pada bagian perencanaan. Selanjutnya usulan itu dimasukkan dalam RKA-KL pada bagian perencanaan untuk disampaikan sebagai perencanaan anggaran.

Perencanaan anggaran yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten kota umumnya meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Unsur tersebut di atas akan membiayai semua program yang direncanakan. Program yang direncanakan harusnya bersifat komprehensif dan simultan, dimana setiap program telah melalui suatu pembahasan dan perencanaan terlebih dahulu sebelum masuk dalam penganggaran. Suatu program diharapkan dapat diselesaikan dengan baik dalam satu tahun anggaran, kecuali dinyatakan bahwa program tersebut akan memakan waktu dan anggaran lebih dari satu tahun (*multiple years*).

Perencanaan anggaran yang baik dalam pemerintahan, seharusnya mempertimbangkan kondisi suatu daerah khususnya berkaitan dengan keberadaan masyarakat. Perencanaan dengan memperhatikan keberadaan masyarakat akan mengurangi aspek-aspek yang mempengaruhi kemiskinan di suatu daerah seperti; Memberikan Pendidikan dan pelatihan kepada kelompok usaha masyarakat, Pemberian subsidi tenaga kerja, Program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, Mendukung usaha mikro, menjaga ketrabilan harga barang pokok dan Membuka lapangan kerja.

Selain perencanaan, tingkat penyerapan anggaran haruslah menjadi perhatian. Di Indonesia, lambatnya penyerapan anggaran menjadi masalah klasik yang terus terjadi setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada lambatnya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, khususnya yang menyentuh kehiduan masyarakat. Disamping itu,

permasalahan keterlambatan dan ketidakpastian penyerapan anggaran menyebabkan tidak optimalnya usaha-usaha penempatan dan investasi kas pemda (Williams, 2014). Senada dengan pendapat Williams, menurut Seftianova (2013), mengemukakan buruknya kualitas penyerapan anggaran ini akan berdampak terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan.

Pertama, tidak berjalannya fungsi kebijakan fiskal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara efektif. Kedua, hilangnya manfaat belanja karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Ketiga, terlambatnya pelaksanaan program pemerintah terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Penyerapan anggaran yang belum optimal ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah terutama untuk jenis belanja barang dan belanja modal. Belanja tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktifitas tenaga kerja, peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi.

Permasalahan

Permasalahan penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- Bagaimanakah pengaruh perencanaan terhadap kemiskinan?
- Bagaimanakah pengaruh penyerapan anggaran terhadap kemiskinan?

Tujuan

Tujuan penelitian ini antara lain:

- Untuk menganalisis pengaruh perencanaan terhadap kemiskinan.
- Untuk menganalisis pengaruh penyerapan anggaran terhadap kemiskinan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan

Menurut BAPPENAS, kemiskinan adalah situasi serba kekurangan karena keadaan yang tidak dapat dihindari oleh seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya. Menurut Reitsma dan Kleinpenning, kemiskinan adalah ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat material maupun non-material. Menurut Suparlan, kemiskinan adalah standar tingkat hidup yang rendah karena kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang bila dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku di masyarakat sekitarnya.

Menurut Friedman, kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan kekuasaan sosial. Menurut Faturachman dan Marcelinus Molo, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau beberapa orang (rumah tangga) untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut Ellis, kemiskinan adalah sebuah gejala multidimensional yang bisa dikaji dari

dimensi ekonomi dan sosial politik. Menurut Levitan, kemiskinan adalah kekurangan barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak.

Hall dan Midgley, menyatakan kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi di mana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat. Menurut Syaifuddin, membagi cara berpikir yang memandang kemiskinan sebagai gejala absolut dan sebagai gejala relatif. Cara berpikir (model) mengenai kemiskinan sebagai gejala absolut memandang kemiskinan sebagai kondisi serba berkekurangan materi, hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki sarana untuk mendukung kehidupan sendiri. Cara pandang relativistik ini terdiri atas dua cara pandang, yakni cara pandang (model) kebudayaan, dan cara pandang (model) Struktural.

1. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Sharp et al. (2010), meliputi :

- Rendahnya kualitas angkatan kerja salah satu penyebab terjadinya kemiskinan adalah karena rendahnya kualitas angkatan kerja. Kualitas angkatan kerja ini bisa dilihat dari angka buta huruf. Sebagai contoh Amerika Serikat hanya mempunyai angka buta huruf sebesar 1%, dibandingkan dengan Ethiopia yang mempunyai angka diatas 50%.
- Akses yang sulit terhadap kepemilikan modalKepemilikan modal yang sedikit serta rasio antara modal dan tenaga kerja (capital-to-labor ratios) menghasilkan produktivitas yang rendah yang pada akhirnya menjadi faktor penyebab kemiskinan.
- Rendahnya tingkat penguasaan teknologi Negara-negara dengan penguasaan teknologi yang rendah mempunyai tingkat produktivitas yang rendah pula. Tingkat produktivitas yang rendah menyebabkan terjadinya pengangguran. Hal ini disebabkan oleh kegagalan dalam mengadaptasi teknik produksi yang lebih modern. Ukuran tingkat penguasaan teknologi yang rendah salah satunya bisa dilihat dari penggunaan alat-alat produksi yang masih bersifat tradisional.
- Penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Negara miskin sumber daya yang tersedia tidak dipergunakan secara penuh dan efisien. Pada tingkumah tangga penggunaan sumber daya biasanya masih bersifat tradisional yang menyebabkan terjadinya ineffisiensi.
- Pertumbuhan penduduk yang tinggi Menurut Teori Malthus jumlah penduduk berkembang sesuai deret ukur sedangkan produksi bahan pangan berkembang sesuai deret hitung. Hal

ini mengakibatkan kelebihan penduduk dan kekurangan bahan pangan yang menyebabkan kemiskinan.

Menurut Kuncoro (2016) sebagai berikut: Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah, Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah dan kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal.

Penyebab kemiskinan dan keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Akibat keterbatasan dan ketertidadaan akses manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa terpaksa saat ini yang dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan demikian manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat.

2. Kebijakan-Kebijakan Mengurangi Kemiskinan

Kebijakan-kebijakan memiliki beda pandangan menurut filsuf pembuat kebijakan dan pemerintah, banyak sekali kebijakan yang dibuat agar penduduk miskin keluar dari lingkaran kemiskinan. Pemerintah harus menciptakan jaring pengaman untuk mencegah penduduknya terlalu miskin. Berikut ini beberapa kebijakan untuk mengurangi kemiskinan:

- **Membuat Upah Minimum**

Di banyak negara telah terdapat undang undang yang mengharuskan perusahaan meyekti tidak dapat seenaknya menentukan upah para pekerja dengan tujuan agar para pengusaha tidak seenaknya memberikan upah, dan para pengusaha tidak merasa rugi dalam memberikan upah karena diperaturan tersebut sudah tercantum minimal upah. Pemberian upah minimum juga dilihat dari pendidikan dan keahlian yang dimiliki para pekerja.

- **Kesejahteraan**

Cara lain yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan standar kalangan miskin adalah dengan memberikan pendapatan tambahan secara langsung. Biasanya yang mendapatkan bantuan tambahan pendapatan pada masyarakat miskin yaitu keluarga yang tidak memiliki kepala keluarga.

- **Pajak Pendapatan Negatif**

Pajak pendapatan negatif adalah Kredit Pajak Pendapatan yang diperoleh. Hasil dari kredit pajak pendapatan yang diterima *Earned Income Tax Credit*, EITC). selanjutnya akan disalurkan kepada penduduk yang miskin.

Perencanaan Anggaran

Perencanaan secara konvensional didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun sebelumnya. Perencanaan (*planning*) merupakan proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi berupa penentuan strategi untuk pencapaian tujuan secara menyeluruh serta perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga tercapainya tujuan tersebut (Robbins dan Coulter, 2002 dalam Bastian, 2010).

Perencanaan dapat dilihat dalam tiga kategori, yaitu:

- a) Dari segi proses: perencanaan merupakan proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cara pencapaian tujuan tersebut.
- b) Dari segi fungsi manajemen: perencanaan berfungsi ketika pimpinan menggunakan pengaruh atau wewenangnya untuk menentukan atau mengubah tujuan serta kegiatan organisasi.
- c) Dari segi pengambilan keputusan: perencanaan merupakan pengambilan keputusan jangka panjang atau yang akan datang mengenai hal yang akan dilakukan, cara pelaksanaan, dan waktu serta pelaku hal tersebut. Dalam perencanaan, keputusan yang diambil belum tentu sesuai dengan tujuan sebelumnya hingga implementasi perencanaan tersebut akan dibuktikan di masa datang.

Inti dari perencanaan adalah salah satu langkah mengantisipasi kejadian di masa depan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di awal. Salah satu bagian dari perencanaan organisasi, baik itu organisasi publik, maupun organisasi privat, adalah perencanaan anggaran.

Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan mencakup penyusunan Kebijakan Umum APBD sampai dengan disusunnya Rancangan APBD terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 serta Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004.

Penyerapan Anggaran

Kondisi penyerapan anggaran pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia mempunyai kondisi yang hampir sama, diistilahkan menurut Bank Dunia yaitu lambat di awal tahun namun menumpuk di akhir tahun (*slow and back-loaded expenditure*). Penyerapan yang menumpuk di akhir tahun biasanya belanja yang nonrecurrent, seperti belanja modal dan belanja bantuan sosial. Menurut Halim (2014), penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai

selama periode waktu tertentu dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran).

Secara lebih mudah orang awam menyebutnya pencairan anggaran. Oleh karena yang diamati adalah organisasi sektor publik atau entitas pemerintahan, maka penyerapan anggaran disini dapat diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada saat tertentu. Senada dengan hal itu menurut Kuncoro (2016), penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran. "Kinerja manajer publik akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, berapa besar yang berhasil dicapai.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis simpangan kinerja aktual dengan yang dianggarkan" (Mardiasmo, 2016). Sedangkan menurut Lusiana dalam Adi (2017), kemampuan penyerapan anggaran dianggap baik dan berhasil apabila prestasi realisasi penyerapan adalah sesuai dengan prestasi aktual fisik pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan anggapan bahwa prestasi fisik aktual pekerjaan tersebut adalah relatif sama dengan target prestasi penyelesaian pekerjaan yang direncanakan.

Secara sederhana, dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa suatu penyerapan anggaran dikatakan baik apabila telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Menurut Halim (2014), terdapat dua sudut pandang mengenai rendahnya penyerapan anggaran. Ada pun pendapat tersebut sebagai berikut:

- a) Penyerapan anggaran yang dimaksud adalah realisasi anggaran pada akhir tahun dibandingkan dengan anggarannya.
- b) Dari segi ketidak-proporsionalitasnya penyerapan anggaran. Menurut Lubis dalam Shenny (2012), mengatakan efektivitas penyerapan anggaran lebih menekan pada pencapaian segala sesuatu yang dilaksanakan berdaya guna yang berarti tepat, cepat, hemat, dan selamat.

METODOLOGI

Desain Penelitian

Penelitian ini dengan tujuan menjelaskan hubungan kausal yaitu hubungan antar variabel yang digunakan. Jenis data penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi BPS Provinsi Maluku.

Populasi dan Sampel.

Penelitian ini dilakukan pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang berjumlah 11 Kabupaten/Kota. Penelitian ini merupakan penelitian sensus, yaitu penelitian yang menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel.

Definisi dan Pengukuran Variabel

Varibel-variabel yang digunakan dalam penelitian seperti diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel. 2 Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel	Pengukuran	Skala
Kemiskinan (Y); Kemiskinan adalah sejumlah penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.	Data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku menggunakan indeks gini dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS).	Rasio
Perencanaan Anggaran (X1). Perencanaan anggaran adalah tahap estimasi pengeluaran untuk pelaksanaan kegiatan yang harus sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan yang telah dirumuskan dalam renstra organisasi.	Perencanaan anggaran diukur dengan data rasio pendapatan terhadap belanja.	Rasio
3.Penyerapan Anggaran (X2). penyerapan anggaran satuan kerja adalah proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran	Penyerapan anggaran diukur dengan rasio alokasi dan realisasi APBD	Rasio

Teknik Analisis Data

Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan karena alat analisis yang digunakan adalah regresi. Syarat regresi yang baik harus melewati pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dengan tujuan untuk memenuhi syarat normalitas, bebas multikolonieritas dan bebas heteroskedastisitas.

Pengujian Regresi

Persamaan *Regression Analysis* berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

3. PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Hasil Pengujian Normalitas Data

Tabel 3. Penjumlahan Normalitas

Keterangan	Unstandardized Residual
Nilai Kolmogorov-Smirnov Z	0,50
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,96

Sumber: data primer diolah tahun 2023

Data di atas menunjukkan nilai *kormogolov smirnov* adalah 0,50 serta tingkat signifikansi adalah 0,96 yang lebih besar dari 0,05. Disimpulkan, data terdistribusi secara normal.

Hasil Pengujian Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Variabel Independen	Nilai Tolerance	Nilai VIF
X1	0,92	1,08
X2	0,92	1,08

Sumber: data primer diolah tahun 2023

Data di atas memperlihatkan nilai *tolerance* variabel independent < 0,1. Artinya, bebas korelasi antar variabel independen. Selanjutnya nilai *variance inflation factor* (VIF) variabel independen > 10. Disimpulkan, bebas dari multikolinearitas.

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Gambar 1. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas



Sumber: data primer diolah tahun 2023

Hasil pengujian heteroskedastisitas di atas menunjukkan pola yang jelas, dengan titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Disimpulkan, tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Hasil Pengujian Autokorelasi

Tabel 5. Pengujian Autokorelasi

N	Nilai DW	Nilai DU	4-DU	DU<DW<4-DU
36	2,36	1,37	2,63	1,37<2,36<2,6

Sumber: data primer diolah tahun 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa, nilai DW adalah sebesar 2,41 sedangkan nilai DU adalah sebesar 1,37 dan hasil pengurangan 4-DU adalah sebesar 2,63 maka persyaratan $DU < DW < 4-DU$ dapat terpenuhi sehingga nilai yang diperoleh telah memenuhi syarat tidak terkena autokorelasi

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 6. Pengujian F-Statistik, Uji-t Statistik, Uji Determinansi (R^2)

Keterangan	Koefisien	t	P-value
F Model	27,90	-	-
Sig	0,00	-	-
R^2	0,69	-	-
R Square	0,47	-	-
Adjusted R Square	0,45	-	-
(Constant)	0,29	0,06	0,94
X1	0,27	6,68	0,00
X2	0,26	3,59	0,00

Sumber: data primer diolah tahun 2023

Tabel .6 di atas menunjukkan bahwa nilai F-tabel adalah sebesar 7,191 dengan tingkat probabilitas signifikansi sebesar 0,00 (0%). Nilai probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel Perencanaan Anggaran (X1) dan Penyerapan Anggaran (X2) terhadap variabel Kemiskinan (Y).

Hasil pengujian koefisien determinasi pada tabel diatas menunjukkan bahwa, besarnya nilai adjusted R square adalah sebesar 0,261 atau sekitar 26,1 %. Hal ini memberi arti bahwa variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 26,1%, sedangkan sisanya 73,9 % dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Hasil uji t statistik pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa variabel perencanaan anggaran (X1) berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar (-0,318) serta nilai probabilitas atau nilai signifikansi sebesar 0,025 di bawah derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 sehingga hipotesis yang diusulkan diterima. Hasil uji t statistik pada tabel diatas juga menunjukkan variabel penyerapan anggaran (X2) berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar (-0,250) serta nilai probabilitas atau nilai signifikansi di bawah derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 sehingga hipotesis yang diusulkan diterima.

Pembahasan Hipotesis

Pengaruh Perencanaan Anggaran (X₁) Terhadap Kemiskinan (Y).

Hipotesis pertama yang diuraikan dalam penelitian ini adalah “perencanaan anggaran (X1) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Y)”. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan variabel perencanaan anggaran (X1) berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar (-0,318) serta nilai probabilitas atau nilai signifikansi sebesar 0,025 di bawah derajat signifikansi yang digunakan adalah yaitu 0,05 sehingga hipotesis yang diusulkan

diterima. Adanya hubungan negatif menunjukkan hubungan kedua variabel dimaksud tidak searah. Artinya, jika perencanaan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota memperhatikan segala program pengentasan kemiskinan, maka secara langsung berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di masyarakat. Sebaliknya, jika perencanaan anggaran yang dilakukan kurang memperhatikan permasalahan kemiskinan di masyarakat, maka tingkat kemiskinan akan semakin meningkat. Semakin baik perencanaan anggaran, akan berdampak kepada semakin menurun tingkat kemiskinan. Sebaliknya, jika perencanaan anggaran dilakukan dengan tidak efektif, maka berdampak juga bagi peningkatan kemiskinan. Pengaruh yang signifikan antara perencanaan anggaran (X_1) terhadap kemiskinan (Y) memberi arti bahwa perencanaan anggaran berpengaruh besar terhadap kemiskinan.

Kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk problem yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang. Masalah kemiskinan ini menuntut adanya suatu upaya pemecahan masalah secara berencana, terintegrasi dan menyeluruh dalam waktu yang singkat. Upaya pemecahan masalah kemiskinan tersebut sebagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan yang selama ini sedang dilaksanakan. Program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui belanja langsung di masing-masing Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan di daerah dan adanya umpan balik (feedback) terhadap strategi jangka panjang yang dirumuskan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, maka daerah-daerah, khususnya yang ada di Provinsi Maluku, memberikan berbagai masukan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran strategi penanggulangan kemiskinan. Masukan-masukan ini menyangkut aspek perencanaan dan penganggaran, seperti aspek kelembagaan, kebijakan dan penganggaran program, ketersediaan sumber daya manusia, penyediaan data dan informasi. Selain itu, juga ada masukan mengenai peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga-lembaga donor, dan lembaga swadaya masyarakat dalam memberikan dorongan atau support untuk menyusun perencanaan dan penganggaran strategi penanggulangan kemiskinan di daerah.

Kelemahan-kelemahan yang ditemui dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran strategi penanggulangan kemiskinan selama ini telah dirumuskan menjadi lima kategori, yaitu (1) aspek kelembagaan penanggulangan kemiskinan, (2) kebijakan dan penganggaran program untuk penanggulangan kemiskinan, (3) sumber daya manusia, (4) data dan informasi mengenai

kemiskinan, dan (5) sistem monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Salah satu prinsip dalam penganggaran adalah value for money. Tiga elemen dalam konsep value for money yaitu ekonomi dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efesien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Program dan anggaran di Provinsi Maluku haruslah diupayakan lebih efektif dalam pelaksanaannya terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Artinya, secara umum program dan anggaran di Pemerintah Kabupaten/Kota bahkan di Pemerintah Provinsi Maluku harus mampu menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan yang ada.

Pengaruh Penyerapan Anggaran (X_2) Terhadap Kemiskinan (Y)

Hipotesis kedua yang diuraikan dalam penelitian ini adalah “penyerapan anggaran (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Y)”. Hasil uji t-statistik juga menunjukkan variabel penyerapan anggaran (X_2) berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar (-0,250) serta nilai probabilitas atau nilai signifikan di bawah derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 sehingga hipotesis yang diusulkan diterima. Adanya hubungan negatif menunjukkan hubungan kedua variabel dimaksud tidak searah. Artinya, jika penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap program pengentasan kemiskinan dilakukan dengan baik, maka secara langsung berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di masyarakat. Sebaliknya, jika lambatnya penyerapan anggaran untuk program-program pengentasan kemiskinan, maka tingkat kemiskinan akan semakin meningkat. Semakin baik penyerapan anggaran, akan berdampak kepada semakin menurun tingkat kemiskinan. Sebaliknya, jika penyerapan anggaran dilakukan dengan maksimal, maka berdampak juga bagi peningkatan kemiskinan. Selanjutnya, pengaruh yang signifikan antara penyerapan anggaran (X_2) terhadap kemiskinan (Y) memberi arti bahwa penyerapan anggaran berpengaruh besar terhadap kemiskinan.

Pengeluaran pemerintah melalui penyerapan anggaran merupakan suatu jenis kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mensejahterahkan masyarakat dan menuju masyarakat yang bebas dari kemiskinan. Pengurangan jumlah penduduk miskin tersebut diindikasikan dapat menurun sebagai pengaruh dari berbagai program dan kegiatan untuk penduduk miskin. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan tingkat penyerapan anggaran belanja di masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Provinsi Maluku yang berhubungan

dengan program-program pengentasan kemiskinan. Terdapat beberapa aspek yang penting untuk diperhatikan dalam pengentasan kemiskinan antara lain yaitu pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, pengeluaran subsidi, perilaku rumah tangga, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta aspek penting lainnya yang berperan untuk pengurangan angka kemiskinan. Dari beberapa aspek yang ada di atas, aspek pengeluaran adalah aspek yang krusial bagi pemerintah, sebab besaran dari pengeluaran ditetapkan secara langsung oleh pemerintah dan pada akhirnya dapat mempengaruhi angka kemiskinan. Oleh karena itu, pengurangan angka kemiskinan dapat ditekan, apabila tingkat penyerapan anggaran lebih ditingkatkan. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten/Kota untuk menekan angka kemiskinan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Untuk kepentingan penghitungan dampak alokasi anggaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja, maka digunakan anggaran infrastruktur. Pembangunan infrastruktur akan mendorong investasi, dengan adanya investasi, ekonomi akan berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Hasil pengujian terhadap 36 Observasi pengamatan memberikan kesimpulan penelitian ini antara lain:

1. Variabel Perencanaan Anggaran (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji-statistik yang menunjukkan nilai probabilitas atau nilai signifikan sebesar 0,025 di bawah tingkat signifikan 0,05 sehingga disimpulkan bahwa pengaruh variabel perencanaan anggaran terhadap variabel kemiskinan diterima.
2. Variabel Penyerapan Anggaran (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji-statistik yang menunjukkan nilai probabilitas atau nilai signifikan sebesar 0,034 di bawah tingkat signifikan 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh penyerapan anggaran terhadap variabel kemiskinan diterima.

Saran

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat memberikan saran dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui perencanaan dan penyerapan anggaran;

1. Meningkatkan efektivitas perencanaan anggaran yang menyentuh kepentingan masyarakat.
2. Melaksanakan strategi penguatan perencanaan dan penganggaran di Provinsi Maluku dalam penanggulangan kemiskinan

3. Peningkatan penyerapan anggaran dalam penanggulangan kemiskinan sehingga dapat menurunkan rosio kemiskinan di Provinsi Maluku.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Wisnu. 2017. *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah*, Jurnal, Tidak Dipublikasikan, Fakultas Ekonomi UNDIP, Semarang.

Bastian, Indra. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Erlangga.

Halim, Abdul.2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik* problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jakarta : Salemba Empat.

Kuncoro, I. D. (2016). *Analisis atas Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasiannya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Kediri)*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Mardiasmo. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Simatupang & Saktyanu K. Dermoredjo, 2003. " *Produksi Domestik Bruto, Harga dan Kemiskinan: Hipotesis "Trickle Down" Dikaji Ulang* , " Economics and Finance in Indonesia , Faculty of Economics and Business, University of Indonesia, vol. 51, pages 291-324, September.

Sharp et al.(2010).*Economics of Social Issues 14th edition*, New York.Kuncoro,Mudrajad. (2016). Otonomi dan Pembangunan Daerah, Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Penerbit Erlangga, Yogyakarta.

Williams, Scott David. 2014. *Personality, attitude, and leader influences on divergent thinking and creativity in organizations*. European Journal of Innovation Management, Vol. 7 No. 3, pp. 187-204.